

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No.71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 muncul sebagai pengganti dan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan ini menyatakan bahwa SAP dijabarkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), disertai dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, dan disusun berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah, sebagai upaya untuk menyelaraskan sikap dan visi dalam implementasi standar tersebut sebelumnya,. regulasi dalam paradigma pemerintahan daerah yang dilandasi nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih .

Penetapan peraturan ini sekaligus merupakan perkembangan yang signifikan dalam sejarah pengelolaan keuangan nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP merupakan serangkaian prinsip akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.. Serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, ringkasan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Setelah diberlakukannya SAP, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pelaksanaan APBN dan APBD. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan pemerintah dan membuat laporan keuangan pemerintah lebih sederhana untuk dipahami.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan tiga belas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1.1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menjadi acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun laporan keuangan, bagi pemeriksa, dan bagi pengguna laporan keuangan dalam mencari solusi atas permasalahan yang belum diatur oleh PSAP. Ini adalah konsep dasar untuk pengembangan SAP.

2.1.1.2. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.3. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

2.1.1.4. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Aktivitas operasi, investasi dalam aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-penganggaran adalah komponen-komponen yang dapat ditemukan dalam

laporan arus kas, yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu.

2.1.1.5. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

2.1.1.6. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui Ketika potensi manfaat ekonomi masa depan mengalir ke pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal saat diterima atau terjadi pengalihan hak kepemilikan/kepenguasaan. Persediaan ditampilkan sebesar: biaya perolehan jika didapat dengan dibeli; Biaya produksi jika diproduksi sendiri; dan nilai wajar, jika diperoleh melalui sumbangan atau cara lain.

2.1.1.7. PSAP No. 6 Akuntansi Investasi

Laporan realisasi anggaran tidak memasukkan pengeluaran untuk investasi jangka pendek karena dianggap sebagai pengeluaran kas pemerintah, sedangkan pengeluaran untuk investasi jangka panjang dianggap sebagai pengeluaran pembiayaan. Dalam laporan realisasi anggaran, penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Sebaliknya, penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Nilai rata-rata digunakan untuk menentukan nilai investasi milik pemerintah tertentu yang dijual.

2.1.1.8. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Biaya perolehan digunakan untuk menilai aset tetap. Nilai wajar pada saat perolehan digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan. Pada saat perolehan, aset tetap yang dihibahkan harus dicatat sebesar nilai wajarnya. Semua aset tetap, kecuali tanah dan

konstruksi yang sedang berjalan, dikenakan penyusutan berdasarkan sifat dan karakteristiknya.

2.1.1.9. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu objek berwujud dianggap sebagai konstruksi dalam penyelesaian jika: Ada kemungkinan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat finansial di masa depan; biaya perolehan tersebut.

2.1.1.10. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pelaporan keuangan yang bertujuan umum harus menyajikan liabilitas yang diakui ketika kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomik akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini, dan perubahan kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Ketika dana pinjaman diterima atau ketika kewajiban timbul, maka ketika itu juga kewajiban diakui. Kewajiban dicatat berdasarkan besar nilai nominal. Rupiah digunakan untuk menerjemahkan dan mencatat kewajiban dalam mata uang lain. Terjemahan mata uang asing menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh bank sentral pada tanggal neraca.

2.1.1.11. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Ada dua jenis kesalahan berdasarkan sifat kejadiannya yaitu : kesalahan yang jarang terjadi dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang diantisipasi tidak akan terjadi lagi disebut sebagai kesalahan yang tidak berulang, dan harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan laporan keuangan. Semua persyaratan yang tercantum di bawah ini harus dipenuhi untuk peristiwa luar biasa.

- 1) Bukanlah kegiatan yang normal dari sebuah entitas;
- 2) Diharapkan tidak terjadi dan diharapkan tidak terjadi berulang;
- 3) Ada diluar kuasa atau pengaruh dari entitas;

- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Pada dasarnya, jumlah dan dampak kejadian luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.1.12. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan merupakan komponen yang membentuk laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi mencakup jumlah yang dibandingkan dengan periode sebelumnya dan disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelapor. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, informasi tentang kebijakan akuntansi entitas pelapor dan informasi lainnya yang diwajibkan atau disarankan untuk diungkapkan harus dicantumkan dalam CaLK. Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti pedoman yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar.

2.1.1.13. PSAP No.12 Laporan Operasional

Informasi berikut merupakan informasi yang tercermin dalam laporan operasional, yang merinci seluruh aktivitas operasional keuangan entitas pelapor.

- 1) Pendapatan-LO
- 2) Beban
- 3) Surplus/defisit dari operasional suatu entitas pelaporan yang penyajiannya didampingkan dengan periode sebelumnya
- 4) Aktifitas non operasional
- 5) Surplus/defisit operasional sebelum pos luar biasa
- 6) Pos luar biasa
- 7) Surplus/defiit laporan operasional

Periode pelaporan Laporan operasional disajikan minimal satu kali setiap tahunnya. Jika tanggal pelaporan entitas berubah dan laporan operasi tahunan disajikan untuk periode waktu yang lebih pendek dari satu tahun, maka ada beberapa informasi yang harus diungkapkan, yakni:

- a) Alasan mengapa periode pelaporan yang digunakan tidak satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah perbandingan dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.1.14. PSAP No.13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan keuangan BLU yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas BLU itu sendiri. BLU kini melaporkan tujuh laporan keuangan yang disajikan secara akrual.

Pembuatan standar dalam proses pengembangan standar, pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menjalankan tugasnya, dan pembaca laporan keuangan dalam proses pemahaman laporan keuangan yang disajikan diharapkan memahami dan mentaati prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Dasar akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi atas bentuk, periodisitas, konsistensi, pengungkapan penuh, dan penyajian wajar adalah delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Rachmat (2010:19) mengungkapkan bahwa pelaporan, perhitungan, pengelompokan, informasi, dan ringkasan kuantitatif merupakan komponen yang membentuk Akuntansi Pemerintahan, yang digunakan untuk mengendalikan semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat..

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah itu, pemerintah

menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP), yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintah dan berfungsi agar standar akuntansi tersebut lebih mudah dipahami. Selain itu, dalam mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan, organisasi sektor publik harus mengacu pada standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Menurut Rachmat (2010:33) ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

2.1.2.1. Basis Akuntansi (Accounting Basis)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk mengukur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan diakui pada saat entitas pelapor menerima kas di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau di tempat lain. Sedangkan untuk transfer dana dari entitas pelapor atau Rekening Kas Umum Negara/Daerah dicatat sebagai beban. Istilah laba tidak digunakan oleh entitas pelapor. Selisih antara penerimaan aktual dan pengeluaran menentukan sisa pembiayaan anggaran (kurang lebih) untuk setiap periode. Laporan realisasi anggaran menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas terbuka seperti bantuan dari pihak luar berupa barang dan jasa.

Dalam neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dengan menggunakan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah. Ini berarti bahwa terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayar, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat setiap kali transaksi terjadi atau ketika peristiwa atau kondisi lingkungan mempengaruhi keuangan pemerintah.

2.1.2.2. Prinsip Nilai Historis (Historical Cost Principle)

Pada saat perolehan, aset dicatat sebesar nilai wajar imbalan atau jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan. Jumlah kas dan setara kas yang diantisipasi akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa depan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dicatat sebagai kewajiban. Karena lebih dapat diverifikasi

dan objektif, nilai sejarah lebih dapat dipercaya daripada penilaian lainnya. Nilai wajar aset atau liabilitas terkait dapat dimanfaatkan tanpa adanya nilai historis.

2.1.2.3. Prinsip Realisasi (Realization Principle)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang wajib disusun. Oleh karena itu, pendapatan atau belanja yang dengan basis kas (cash basis) diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

2.1.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form Principle)

Tujuan dari informasi adalah untuk secara akurat menggambarkan transaksi dan peristiwa yang diperlukan. Maka dari itu, transaksi dan peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonominya, bukan hanya aspek formalnya. Hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan jika substansi transaksi atau peristiwa lain berbeda atau tidak sesuai dengan aspek formalitas..

2.1.2.5. Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

Aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelapor perlu dipecah menjadi periode-periode pelaporan untuk mengukur kinerja entitas dan mencari tahu di mana sumber dayanya berada. Periode waktu utama adalah setiap tahun. Namun, interval setengah tahunan, bulanan, dan triwulanan juga disarankan.

2.1.2.6. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Entitas pelapor menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk peristiwa serupa dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk beralih dari metode akuntansi yang satu ke metode yang lainnya. Jika metode baru mampu memberikan informasi yang lebih

baik dari metode sebelumnya, maka metode akuntansi dapat diubah. Kemudian Catatan atas Laporan Keuangan akan merinci dampak dan pengaruh dari perubahan penerapan metode ini.

2.1.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.1.2.8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan semuanya memberikan laporan yang akurat tentang realisasi anggaran. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian mengenai peristiwa dan keadaan tertentu, faktor pertimbangan yang sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dalam kerangka penyajian wajar. Sifat dan tingkat ketidakpastian ini dipublikasikan untuk mengakui keberadaan mereka, dengan membuat keputusan yang bijaksana ketika menyiapkan laporan keuangan.

Saat membuat perkiraan dalam menghadapi ketidakpastian, pertimbangan yang sehat mencakup tingkat kehati-hatian untuk memastikan bahwa aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan liabilitas tidak terlalu rendah. Sebaliknya, penggunaan penilaian yang baik mencegah, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, pengaturan aset atau pendapatan yang disengaja pada tingkat yang terlalu rendah, atau pencatatan kewajiban atau pengeluaran yang disengaja pada tingkat yang terlalu tinggi, sehingga bahwa laporan keuangan menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak netral.

2.1.3. Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Tujuan standar akuntansi pemerintah adalah pertama-tama untuk membantu penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu sendiri. Selain itu adanya standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan, menjadikan penyajiannya menjadi lebih terbuka dan jujur.

1) Akuntabilitas

Tujuannya adalah memberi pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2) Manajemen

Yaitu untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3) Transparansi

Yaitu memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur.

4) Keseimbangan

Yaitu untuk memberikan informasi mengenai keseimbangan antara penerimaan pemerintah dan juga pengeluarannya.

2.1.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Robert & Vijay dalam Nurlaila (2014:31) menyatakan bahwa hubungan antara output pusat dengan pertanggungjawaban dan tujuannya adalah hal yang menentukan efektivitas sistem. Kemampuan untuk menjadi efektif dan efisien harus mencirikan penerapan standar akuntansi pemerintahan.

2.1.4.1. Efektif

Memilih tujuan yang tepat dari berbagai pilihan atau pilihan bagaimana mencapainya dan membuat pilihan dari berbagai pilihan lain. Standar akuntansi diperlukan untuk sejumlah alasan, termasuk keseragaman laporan keuangan, kemudahan dalam penyusunannya, kemudahan auditor dalam melaksanakan tugasnya, dan kemudahan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan berbagai entitas. Ada empat macam SAK yang dijalankan di Indonesia saat ini, antara lain ;

1) PSAK- IFRS

- 2) SAK ETAP
- 3) PSAK Syariah
- 4) SAP

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK-IFRS dan SAK ETAP, PSAK Syariah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah, sedangkan SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.4.2. Efisien

Penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi mengandaikan bahwa tujuan yang tepat telah ditetapkan dan mencoba menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat diukur melalui penilaian standar yang membandingkan masukan yang diterima dan keluaran yang diterima. Misalnya kita membandingkan dua metode dalam penyelesaian sebuah tugas, yakni metode A dan metode B. Metode A dikatakan lebih efisien daripada Metode B karena Metode A membutuhkan waktu 1 jam dan Metode B 2 jam untuk menyelesaikan tugas. Artinya, tugas dapat dilakukan dengan cara atau efisiensi yang tepat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ditentukan oleh tercapai atau tidaknya tujuan instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penerapan akuntansi pemerintahan, maka perlu diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut. Hal ini akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.5. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen atau sebuah laporan yang mencakup data tentang posisi keuangan organisasi. Perusahaan membuat atau merilis laporan keuangan berdasarkan temuan proses akuntansi yang kemudian akan diinformasikan kepada pihak internal dan eksternal yang terkait tentang

keuangan..

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2015 Tentang Penyajian Laporan Keuangan mengungkapkan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas.

2.1.6. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut PSAK 2015 No.1 terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut.

2.1.6.1. Laporan Posisi Keuangan

Terdapat beberapa pos komponen yang ada dalam laporan posisi keuangan, diantaranya ialah:

- 1) Aset tetap
- 2) Property investasi
- 3) Aset tak berwujud
- 4) Aset keuangan
- 5) Investasi dengan menggunakan metode ekuitas
- 6) Persediaan
- 7) Piutang dagang dan piutang lainnya
- 8) Kas dan setara kas
- 9) Total nilai aset yang dimiliki untuk dijual dan nilai aset yang termasuk dalam kategori pelepasan.
- 10) Utang dagang dan terutang lain
- 11) Provinsi
- 12) Liabilitas keuangan
- 13) Liabilitas dan aset untuk pajak kini
- 14) Liabilitas dan aset pajak tangguhan

- 15) Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklarifikasikan sebagai milik
- 16) Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas
- 17) Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas induk.

2.1.6.2. Laporan Laba rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif mencakup hal-hal berikut.

- 1) Pendapatan
- 2) Biaya keuangan
- 3) Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
- 4) Beban pajak
- 5) Laba rugi setelah pajak. Dalam konteks operasi yang dihentikan, laba rugi setelah pajak dan laba rugi yang diakui dari pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari pelepasan aset kelompok lepasan.
- 6) Laba rugi
- 7) Komponen-komponen yang terdapat dalam pendapatan komprehensif lain yang dikelompokkan berdasarkan sifatnya.
- 8) Metode ekuitas yang digunakan untuk mencatat bagian pendapatan dari komprehensif lain dari entitas asosiasi dan bentura bersama.
- 9) Jumlah keseluruhan laba rugi komprehensif

2.1.6.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas mencakup:

- 1) Total laba rugi komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali
- 2) Untuk stiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui.

- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi anyara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan.

2.1.6.4. Laporan Arus Kas

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

2.1.6.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu. Selain itu juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan dan juga memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.6.6. Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Pengungkapan kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.1.7. Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan “laporan keuangan adalah laporan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dibuat secara terstruktur yang dibuat oleh sebuah entitas pelaporan”. Kondisi dan kinerja keuangan dari entitas tersebut merupakan hasil penggambaran dari laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah pusat merupakan salah satu pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membutuhkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas penyerahan sumber daya keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki komponen-komponen berikut:

- 1) Laporan Realisasi APBD (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Catatan atas Laporan Keuangan
- 4) Laporan Arus Kas (LAK)
- 5) Perubahan Saldo Anggaran Lebih (PSAL)
- 6) Laporan Operasional

Adapun pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut.

- a) Pemerintah daerah Internal
- b) Pemerintah Daerah Eksternal (DPRD, BPK, Investur, Kreditur, dan Donatur, Analis ekonomi dan pemerhati pemda, Pemerintahan provinsi, dan Pemerintah pusat)
- c) Masyarakat
- d) Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA- PPKD) sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD
- e) Berperan sebagai wakil pemda (entitas pelaporan), SA-Konsolidator akan mencatat seluruh transaksi resiprokal yang terjadi antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan akan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan (laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

2.1.8. Tujuan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi terkait tentang situasi keuangan entitas pelapor dan semua transaksi yang dilakukan selama

periode pelaporan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan digunakan untuk menentukan kepatuhan terhadap undang-undang.

Menyediakan informasi tentang posisi laporan keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan merupakan tujuan umum dari laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kegunaannya ialah membantu pengguna dalam melakukan evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah harus memberikan informasi yang dapat membantu pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dibidang ekonomi, sosial dan politik.:

- a) Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Memberikan informasi tentang cukup atau tidaknya penerimaan selama periode berjalan untuk memenuhi seluruh biaya pengeluaran;
- c) Memberikan informasi tentang total penggunaan sumber daya ekonomi dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil apa saja yang telah dicapai;
- d) Memberikan informasi tentang penandaan yang dilakukan entitas pelaporan terhadap seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Memberikan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah terjadi kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan memberikan informasi yang berguna dan untuk tujuan umum juga memiliki peran prediktif dan melihat ke depan, membantu memperkirakan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk operasi yang sedang

berlangsung, sumber daya yang timbul dari operasi yang sedang berlangsung, dan risiko serta ketidakpastian yang terkait.

2.1.9. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP mengungkapkan bahwa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran standar yang harus berisi informasi akuntansi yang akan digunakan untuk mencapai tujuannya. Untuk memenuhi prasyarat kualitas laporan keuangan yang dikehendaki, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah menetapkan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni sebagai berikut.

2.1.9.1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- 3) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2.1.9.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) Penyajian Jujur, informasi disajikan secara jujur sesuai dengan transaksi/peristiwa yang terjadi. Penyajian yang wajar sesuai dengan yang telah terjadi diharapkan dapat tersaji dalam transaksi-transaksi tersebut.
- 2) Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- 3) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.1.9.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

2.1.9.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Sedangkan menurut karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dikategorikan sebagai berikut.

- 1) Kualitas tertinggi (dapat dipahami dan berguna)
- 2) Kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)
- 3) Kualitas sekunder; konsisten, komparatif
- 4) Kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

2.10. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Suatu pemerintahan yang menerapkan standard akuntansi pemerintah dengan baik akan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik pula yang kemudian akan digunakan untuk keperluan di dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Karena itu, penerapan standar akuntansi pemerintah jelas terlihat memiliki hubungan terhadap kualitas laporan keuangan sebuah pemerintahan. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah yang baik dan tepat sesuai dengan pedoman, diharapkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan disajikan memiliki kualitas yang bagus dan akurat dan tentunya juga dapat dipertanggungjawabkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu sangatlah penting bagi acuan dan dasar kajian penelitian yang akan dilakukan pada saat ini. Penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui hasil yang telah mereka temukan. Adapun beberapa

penelitian terdahulu yang dirasa cukup relevan dengan penelitian mengenai pengaruh penerapan standard akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut.

Pada 2008, Mary E. Barth, Wyne R, Landsman, dan Mark H Lang melakukan penelitian dengan judul “*International Accounting Standards and Accounting Quality.*” Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa apakah penerapan standar akuntansi internasional (IAS) dikaitkan dengan kualitas akuntansi yang lebih tinggi. Penerapan IAS mencerminkan gabungan dari sistem pelaporan keuangan, termasuk standard, interpretasinya, penegakan, dan litigasi. Peneliti menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan IAS dari 21 negara secara umum menunjukkan manajemen laba yang lebih sedikit, pengakuan kerugian yang lebih tepat waktu, dan banyak relevansi nilai dari jumlah akuntansi daripada perusahaan sampel yang cocok yang menerapkan standard domestic non-AS. Perbedaan kualitas akuntansi antara dua kelompok perusahaan pada periode sebelum perusahaan IAS mengadopsi IAS tidak memperhitungkan perbedaan postadopsi. Perusahaan yang menggunakan IAS umumnya menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntansi antara periode sebelum dan sesudah menggunakan IAS.

Terdapat perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini yakni objek dari penelitian di atas adalah perusahaan sedangkan objek penelitian kali ini adalah pemerintah daerah.

Pada tahun 2018, Umar Sako dan Felmi D. Lantowa melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan bantuan analisis data regresi linear sederhana. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan juga pembagian kuisisioner. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa penerapan standard akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah kabupaten Gorontalo.

Dibandingkan dengan dengan penelitian ini, keduanya memiliki persamaan yakni penelitian diatas menggunakan variabel terikat dan variabel bebas yang sama dengan penelitian ini dan juga menggunakan metode analisis data yang sama.

Sanusni Ariyanto pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan.” Peneliti menggunakan kuisisioner sebagai metode pengumpulan data dan untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik uji validitas dan uji reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penerapan standard akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2019 Neneng Sri Suprihatin dan Arinda Ayu Ananthy melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Penelitian ini dilakukan di kota Serang. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software Partial Least Square (PLS). setelah melakukan pengolahan data, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan dan begitu juga sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini dimana penelitian di atas menggunakan dua variabel bebas yakni penerapan standard akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi sedangkan penulis hanya menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah.

Masi di tahun yang sama, pada 2019 Tri Ikyarti dan Nila Aprila melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Seluma.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner. Metode penelitian yang dipakai dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan statistic analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan standard akuntansi pemerintah , implementasi sistim informasi manajemen, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yang dilakukan penulis. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistim informasi manajemen daerah dan sistim pengendalian internal pemerintah, sedangkan penulis hanya menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standard akuntansi pemerintah.

Selanjutnya pada 2019, Budhi Purwantoro Jati melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” dengan tujuan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh implementasi standard akuntansi pemerintahan terhadap LKPD di Indonesia. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan 27tandard akuntansi pemerintah berbasis akrual, apakah terjadi peningkatan kualitas atau tidak. Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan kualitas LKPD setelah penerapan SAP berbasis Akrual.

Berbeda dengan penulis, penelitian tersebut menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai variabel bebasnya sedangkan penulis menggunakan penerapan standard akuntansi pemerintah sebagai variabel bebasnya.

Pada 2020 dilakukan penelitian tentang pelaporan keuangan di Nigeria. Penelitian dengan judul “*Effect of Implementation of International public Sector Accounting Standards on Nigeria’s Financial Reporting Quality,*” ini dilakukan oleh Sahid Adekunle Muraina dan Kabiru Isa Dandago. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi sektor public

internasional (IPSAS) terhadap kualitas pelaporan keuangan Nigeria. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survey untuk menentukan pengaruh penerapan IPSAS terhadap kualitas pelaporan keuangan Nigeria. Teknik analisis yang diterapkan adalah teknik analisis Partial Least Square 3 (smart PLS 3). Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di Nigeria. Secara khusus, IPSAS telah meningkatkan akuntabilitas, yang kemudian meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Nigeria. Dengan demikian, ditemukan dalam penelitian ini bahwa akuntabilitas menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menggunakan IPSAS berbasis akrual di Nigeria.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana penelitian tersebut menggunakan variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi sektor public internasional sementara penulis menggunakan variabel bebasnya ialah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah.

Nanda Saputri Yanti pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Populasi penelitian ini adalah pejabat struktural dan staf bagian fungsi keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, dengan metode pengumpulan data adalah dengan kuisioner. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi pemerintah tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan

pengawasan keuangan. Sedangkan penulis hanya menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah.

Pada 2021 Dina Hidayat, Marta Sari, dan Firdaus AR melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.” Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian kemudian menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dibandingkan dengan penelitian tersebut, terdapat perbedaan yakni penelitian tersebut menggunakan dua variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah sedangkan penulis menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda sedangkan penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Pada 2021 Mohd. Idris Dalimunthe, melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur terhadap Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Pematang Silima Kuta Kab. Simalungun.” Data yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuisioner. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis linear berganda. Hasil kemudian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yang diberikan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan jika dibandingkan penelitian penulis. Penelitian tersebut menggunakan dua variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda sedang penulis menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Pada 2021 juga, Sri Mulyanti, Ridwan Ibrahim dan Muslim A. Djalil melakukan sebuah penelitian dengan judul “*The Effect of Government Accounting Standard, Quality of Human Resource, Effectiveness of Internal Control System and Regional Financial Accounting System on The Quality of Regional Government Financial Statement.* ” penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, efektifitas sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah, baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Satuan Kerja (SKPK) Kabupaten Aceh Singkil. Populasi dari penelitian ini adalah SKPK Aceh Singkil yang meliputi 46 dinas di Kabupaten. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda. Setelah melakukan pengolahan data, ditemukan hasil bahwa standard akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kabupaten Aceh Singkil.

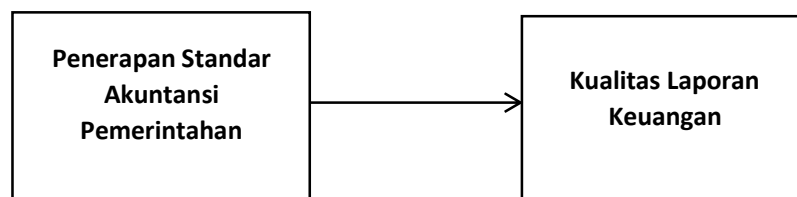
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian tersebut menggunakan empat variabel bebas yakni standar akuntansi pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, efektifitas sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan penulis hanya menggunakan satu variabel bebas yakni penerapan standar akuntansi pemerintah.

2.3. Kerangka Konseptual

Terciptanya pemerintahan yang baik merupakan salah satu cita-cita dari bangsa Indonesia. Terciptanya suatu pemerintahan yang baik tentunya tidak terlepas dari penerapan suatu sistem yang tentunya harus baik pula di setiap bidang kehidupan sebuah pemerintahan. Di Indonesia sendiri telah dikeluarkan banyak undang-undang untuk mengatur kehidupan di pemerintahannya sendiri baik di bidang social, politik ,ekonomi, hukum dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini secara khusus peneliti membahas mengenai laporan keuangan pemerintah. Dimana baik buruknya kualitas suatu laporan keuangan tentunya ditentukan dari seberapa baik peraturan yang dibuat dan seberapa baik aturan itu diterapkan. Adanya standar akuntansi pemerintah tentunya bisa menjadi salah satu faktor penunjang kualitas laporan keuangan yang baik dan tentunya tidak terlepas juga dari seberapa baik penerapannya. Untuk itu, peneliti mencoba menghubungkan dan meneliti apakah penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.1

Kerangka pikir

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu praduga dari suatu bahan yang diamati, yang masih perlu diuji untuk dibuktikan kebenaran dan ketepatannya. Martono (2010:57) menjelaskan bahwa Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya. Berlandaskan pada perumusan masalah yang telah diungkapkan maka dapat dibentuk sebuah hipotesis untuk penelitian kali ini, yakni “ diduga bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Ngada.”